

Dialog Antar-Peradaban: Teori Habermas Sebagai Dasar Filosofis Untuk Memahami Perdamaian Global

Inter-Civilizational Dialogue: Habermas' Theory as a Philosophical Basis for Understanding Global Peace

Anastasia Meilin Gita Permata Laia^{a,1}

^a Magister Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Jl. Jend. Sudirman No.50, Jakarta Selatan, 12930, Indonesia
gitalaia25@gmail.com¹

ABSTRAK

Paper ini mengeksplorasi relevansi teori rasionalitas komunikatif dan etika diskursif Jürgen Habermas sebagai kerangka filosofis untuk memahami dan menyelesaikan konflik antar-peradaban. Dengan pendekatan hermeneutika-kritis, penelitian ini menganalisis konsep rasionalitas komunikatif, yang menekankan pentingnya dialog setara, serta etika diskursif, yang menuntut inklusivitas dalam pengambilan keputusan. Studi kasus konflik Israel-Palestina, perubahan iklim melalui UNFCCC, dan inisiatif Alliance of Civilizations menunjukkan bagaimana teori Habermas dapat diimplementasikan untuk menciptakan dialog yang inklusif dan solutif. Temuan utama menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan dan bias budaya sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan ruang publik global yang sejati. Namun, penerapan teori Habermas dapat mengatasi tantangan ini melalui mekanisme deliberatif berbasis komunitas, pendidikan lintas budaya, dan teknologi digital. Paper ini merekomendasikan penguatan institusi internasional, penggunaan media sosial sebagai ruang deliberatif, dan pengembangan pendidikan berbasis budaya lokal. Dengan demikian, teori Habermas terbukti relevan sebagai landasan filosofis dan praktis dalam membangun perdamaian global. Meski demikian, keberhasilan implementasinya memerlukan adaptasi pada tantangan kontemporer, seperti disinformasi dan dominasi aktor kuat dalam hubungan internasional.

Kata Kunci: Rasionalitas Komunikatif, Etika Diskursif, Dialog Antar-Peradaban

ABSTRACT

This paper explores the relevance of Jürgen Habermas' theory of communicative rationality and discursive ethics as a philosophical framework for understanding and resolving inter-civilizational conflicts. Using a critical-hermeneutic approach, the study analyzes the concept of communicative rationality, which emphasizes the importance of equal dialogue, and discursive ethics, which demands inclusivity in decision-making processes. Case studies on the Israeli-Palestinian conflict, climate change through the UNFCCC, and the Alliance of Civilizations initiative demonstrate how Habermas' theory can be implemented to create inclusive and solution-oriented dialogue. The main findings reveal that power imbalances and cultural biases often hinder the creation of a genuine global public sphere. However, applying Habermas' theory can address these challenges through community-based deliberative mechanisms, cross-cultural education, and digital technologies. The paper recommends strengthening international institutions, utilizing social media as a deliberative space, and developing education rooted in local cultures. Thus, Habermas' theory proves to be relevant as both a philosophical and practical foundation for building global peace. Nevertheless, its successful implementation requires adaptation to contemporary challenges, such as disinformation and the dominance of powerful actors in international relations.

Keywords: Communicative Rationality, Discursive Ethics, Inter-Civilizational Dialogue

Info Artikel :

Disubmit: 10 Desember 2024

Direview: 12 Januari 2025

Diterima : 15 Februari 2025

Copyright © 2025 – PIR Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, konflik antar-peradaban semakin menonjol sebagai tantangan utama dalam hubungan internasional. Samuel Huntington, dalam teori kontroversialnya mengenai "*The Clash of Civilizations*," mengemukakan bahwa konflik pasca-Perang Dingin tidak lagi didominasi oleh ideologi atau ekonomi, melainkan oleh perbedaan budaya dan agama yang menjadi pembeda antar-peradaban dunia (Huntington, 1993). Pandangan ini, meskipun dikritik banyak pihak, mencerminkan realitas meningkatnya ketegangan antar-peradaban, seperti yang terlihat dalam isu global terkait terorisme, imigrasi, dan perbedaan pandangan mengenai hak asasi manusia. Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah mencatat berbagai konflik yang berakar pada ketidaksepahaman antar-peradaban. Misalnya, laporan UNHCR tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah pengungsi yang melarikan diri dari konflik berbasis identitas budaya, seperti perang sipil di Suriah, konflik Rohingya di Myanmar, dan ketegangan di Tepi Barat antara Israel dan Palestina (UNHCR, 2023). Data ini menunjukkan bahwa solusi militer atau politik tradisional sering kali gagal menyelesaikan akar masalah yang bersifat kultural. Sebagai alternatif, dialog antar-peradaban dipandang sebagai pendekatan yang lebih berkelanjutan untuk menciptakan perdamaian global.

Jürgen Habermas, seorang filsuf Jerman yang terkenal dengan teori tindakan komunikatifnya, menawarkan kerangka filosofis yang relevan untuk memahami dan mengelola konflik berbasis budaya. Habermas percaya bahwa rasionalitas komunikatif, yang didasarkan pada pencarian konsensus melalui dialog yang terbuka dan bebas dari dominasi, dapat menjadi landasan bagi interaksi antar-peradaban (Habermas, 1984). Dalam konteks ini, dialog tidak hanya menjadi sarana untuk memahami perbedaan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kepercayaan dan solidaritas global. Namun, penerapan prinsip Habermas dalam konteks hubungan internasional menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan kekuasaan, bias budaya, dan stereotip sering kali menghalangi terciptanya dialog yang sejati. Misalnya, dalam diskursus global mengenai hak asasi manusia, negara-negara Barat sering dianggap mendominasi narasi, sementara pandangan dari negara-negara berkembang cenderung diabaikan (Dryzek, 2000). Hal ini menimbulkan ketegangan dan rasa tidak percaya yang menghambat upaya perdamaian.

Terlepas dari tantangan ini, prinsip rasionalitas komunikatif tetap relevan dalam konteks hubungan antar-peradaban. Dalam kerangka ini, bahasa tidak hanya dipahami sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium untuk menciptakan konsensus yang sah (Bohman & Rehg, 2007). Hal ini penting dalam hubungan internasional, di mana perbedaan budaya dan bahasa sering kali menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan. Selain itu, etika diskursif yang dikembangkan Habermas juga menawarkan pendekatan inklusif dalam resolusi konflik. Prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam diskusi untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan mencerminkan kepentingan bersama (Habermas, 1990). Dalam konteks global, hal ini berarti melibatkan tidak hanya negara-negara besar, tetapi juga masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan kelompok minoritas dalam dialog antar-peradaban. Pentingnya dialog antar-peradaban juga diakui dalam inisiatif global, seperti "*Alliance of Civilizations*" yang diluncurkan oleh PBB. Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan dialog dan kerja sama antar-budaya sebagai cara untuk mengatasi ekstremisme dan menciptakan perdamaian. Namun, keberhasilan inisiatif semacam ini sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip seperti rasionalitas komunikatif dan etika diskursif yang ditawarkan oleh Habermas. Secara keseluruhan, latar belakang ini menunjukkan bahwa konflik antar-peradaban bukan hanya masalah hubungan internasional, tetapi juga tantangan filosofis yang membutuhkan pendekatan baru. Dalam konteks ini, teori Habermas menawarkan kerangka kerja yang tidak hanya relevan, tetapi juga esensial untuk menciptakan perdamaian global yang berbasis pada dialog dan konsensus.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Tindakan Komunikatif

Jürgen Habermas menyampaikan kritik terhadap pendekatan positivistik dalam ilmu sosial, terutama karena pendekatan ini mengesampingkan pentingnya dimensi komunikasi dalam memahami hubungan sosial. Positivisme, menurut Habermas, gagal menghargai logika dan dinamika khusus dari proses komunikasi, yang sebenarnya memainkan peran sentral dalam kehidupan manusia. Habermas mengembangkan konsep tindakan komunikatif sebagai upaya untuk menjawab kelemahan tersebut. Dalam konsep ini, tindakan komunikatif dipahami sebagai interaksi antara individu-individu yang menggunakan bahasa untuk mencapai kesepahaman. Berbeda dengan pendekatan yang berorientasi pada tujuan semata (seperti dalam sistem kapitalis dan birokrasi), tindakan komunikatif bertumpu pada dialog yang rasional, di mana setiap peserta secara aktif berkontribusi untuk membangun konsensus bersama (Habermas, 1990).

Tindakan komunikatif mengaitkan tiga "dunia" yang menjadi kerangka kerja Habermas: dunia objektif, yang mencakup realitas yang bisa diverifikasi; dunia sosial, yang mencakup norma dan hubungan interpersonal; serta dunia subjektif, yang mencerminkan pengalaman dan perasaan individu. Bahasa menjadi elemen penting karena berfungsi sebagai alat untuk menjembatani dimensi-dimensi ini. Dalam proses komunikasi, para partisipan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengevaluasi keabsahan klaim-klaim mereka berdasarkan tiga kategori: kebenaran proposisi (dunia objektif), kesesuaian norma (dunia sosial), dan ketulusan subjek (dunia subjektif). Proses ini memungkinkan tercapainya pemahaman bersama yang menjadi dasar untuk koordinasi tindakan.

Untuk memastikan dialog berlangsung secara adil dan efektif, Habermas memperkenalkan konsep *ideal speech situation* atau "situasi percakapan ideal." Dalam situasi ini, semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, mengemukakan argumen, dan mengkritik pendapat peserta lain tanpa dominasi kekuasaan atau manipulasi. Kejujuran menjadi syarat penting, sehingga setiap peserta benar-benar mewakili pandangan dan maksudnya. Dengan cara ini, tindakan komunikatif tidak hanya menjadi mekanisme untuk menyelesaikan konflik atau membangun konsensus, tetapi juga alat untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih inklusif dan demokratis. Habermas percaya bahwa dengan memenuhi syarat-syarat komunikatif ini, masyarakat dapat mencapai apa yang disebutnya sebagai "keyakinan rasional," yaitu konsensus yang didasarkan pada argumen terbaik. Keyakinan ini bukan hasil paksaan, tetapi hasil deliberasi rasional yang menghormati nilai-nilai universal dan inklusivitas. Model ini, menurut Habermas, merupakan solusi atas banyak masalah sosial yang muncul akibat ketimpangan kekuasaan dan kegagalan sistem-sistem komunikasi tradisional dalam menghadapi kompleksitas realitas manusia (Habermas, 1984:56).

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan basis filsafat kritis dan analisis teori sosial, khususnya teori tindakan komunikatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji relevansi teori Habermas dalam membangun perdamaian global melalui dialog antar-peradaban. Metode penelitian dirancang secara sistematis untuk memberikan analisis mendalam terhadap karya Habermas dan relevansinya dalam konteks hubungan internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis filsafat kritis. Pendekatan ini dipilih karena filsafat kritis memungkinkan analisis yang mendalam terhadap konsep-konsep fundamental, seperti rasionalitas komunikatif, etika diskursif, dan konsensus. Filsafat kritis juga memberikan kerangka analitis untuk mengevaluasi dinamika kekuasaan, ketimpangan, dan bias budaya yang sering terjadi dalam dialog antar-peradaban (Habermas, 1984). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi teori Habermas, tetapi juga menguji penerapannya dalam realitas global.

Pendekatan hermeneutika digunakan untuk membaca karya utama Habermas, seperti *The Theory of Communicative Action* (1984) dan *Moral Consciousness and Communicative Action* (1990). Hermeneutika memungkinkan peneliti untuk memahami gagasan Habermas secara holistik dengan menafsirkan teks dalam konteksnya. Beberapa langkah yang dilakukan adalah:

1. Analisis Teks Filosofis: Penelitian memusatkan perhatian pada gagasan inti dalam karya Habermas, termasuk konsep rasionalitas komunikatif dan etika diskursif. Fokus utama adalah memahami bagaimana dialog digunakan sebagai medium untuk mencapai konsensus dan legitimasi.
2. Kontekstualisasi dalam Hubungan Internasional: Setelah memahami gagasan Habermas, penelitian menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan realitas hubungan internasional. Sebagai contoh, isu ketidaksetaraan dalam dialog Barat dan Dunia Islam dianalisis menggunakan prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Habermas (Dryzek, 2000).
3. Kajian Literatur Pendukung: Selain karya Habermas, penelitian ini juga menggunakan literatur sekunder terkait dialog antar-peradaban, demokrasi deliberatif, dan studi kasus global. Hal ini mencakup laporan dari PBB dan organisasi internasional lainnya, seperti *Alliance of Civilizations* (UNAOC, 2023) yang relevan untuk memahami penerapan dialog di tingkat global.

Penelitian ini menggunakan metode analisis hermeneutika-kritis, yang memadukan interpretasi teks dengan kritik terhadap struktur sosial yang memengaruhi penerapan teori tersebut. Berikut adalah langkah-langkah analisis yang dilakukan:

- a. Interpretasi Filosofis: Analisis dimulai dengan memahami makna inti dari konsep rasionalitas komunikatif dalam teks Habermas. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana dialog dapat mengatasi dominasi dan menciptakan konsensus yang sah (Habermas, 1984).
- b. Analisis Konteks Global: Setelah memahami konsep dasar, penelitian menghubungkannya dengan studi kasus global, seperti dialog Barat-Dunia Islam dalam isu hak asasi manusia dan demokrasi. Metode ini menilai sejauh mana prinsip Habermasian dapat diterapkan untuk menjawab tantangan dalam hubungan internasional.
- c. Kritik Ketimpangan: Dalam penerapan teori Habermas, penelitian mengidentifikasi kendala seperti ketimpangan kekuasaan dan bias budaya. Analisis ini mencakup kritik terhadap struktur kelembagaan internasional, seperti PBB, yang sering dianggap bias terhadap kepentingan negara-negara kuat (UNAOC, 2023).

Proses penyimpulan dilakukan secara deduktif, di mana teori Habermas digunakan sebagai kerangka kerja untuk memahami realitas hubungan internasional. Pendekatan deduktif memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan tentang relevansi teori ini dalam membangun perdamaian global. Beberapa langkah penelitian merumuskan relevansi konsep rasionalitas komunikatif dan etika diskursif dalam konteks dialog antar-peradaban. Hal ini melibatkan penerjemahan prinsip filosofis ke dalam rekomendasi praktis bagi kebijakan global. Berdasarkan temuan, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat institusi global dalam memfasilitasi dialog berbasis prinsip Habermas. Misalnya, memperbaiki representasi budaya dalam forum internasional untuk menciptakan dialog yang lebih inklusif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rasionalitas Komunikatif dan Etika Diskursif oleh Habermas

Jürgen Habermas adalah filsuf Jerman yang menciptakan salah satu teori paling berpengaruh dalam filsafat sosial dan komunikasi, yaitu teori tindakan komunikatif. Dalam karya magnum opusnya, *The Theory of Communicative Action*, Habermas berusaha menjelaskan bagaimana manusia dapat mencapai pemahaman bersama di tengah kompleksitas masyarakat modern. Teori ini menawarkan dasar filosofis untuk membangun dialog, konsensus, dan legitimasi dalam masyarakat plural yang sering kali diwarnai oleh konflik budaya, agama, dan ideologi (Habermas, 1984).

1. Rasionalitas Komunikatif

Habermas membedakan dua jenis rasionalitas utama:

- Rasionalitas instrumental: Berfokus pada keberhasilan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya dalam konteks teknis atau ekonomi.
- Rasionalitas komunikatif: Berfokus pada pencapaian pemahaman bersama melalui dialog yang jujur, terbuka, dan bebas dari dominasi.

Rasionalitas komunikatif menuntut bahwa setiap partisipan dalam dialog memiliki kesetaraan untuk berbicara, mengemukakan argumen, dan mengkritisi pandangan lainnya tanpa tekanan. Dialog yang didasarkan pada rasionalitas ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang pencarian kebenaran dan keadilan melalui proses deliberasi yang demokratis. Rasionalitas komunikatif relevan dalam hubungan internasional, terutama untuk menyelesaikan konflik antar-peradaban. Misalnya, dalam konflik budaya antara negara-negara Barat dan Dunia Islam, teori ini mengusulkan dialog yang memungkinkan kedua belah pihak mendengarkan dan memahami perspektif satu sama lain. Dalam dunia yang terfragmentasi oleh politik identitas, rasionalitas komunikatif membantu mengatasi ketidakpercayaan melalui proses yang transparan dan setara (Dryzek, 2000).

1.2. Etika Diskursif

Sebagai kelanjutan dari rasionalitas komunikatif, Habermas memperkenalkan etika diskursif sebagai panduan normatif untuk pengambilan keputusan yang inklusif. Etika ini didasarkan pada prinsip bahwa hanya keputusan yang dihasilkan melalui diskusi inklusif dan partisipatif yang dapat dianggap sah. Dalam konteks ini, setiap pihak yang terpengaruh oleh suatu keputusan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Etika diskursif menekankan tiga aspek penting:

1. Keterlibatan Aktif: Semua pihak yang terpengaruh oleh keputusan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi.
2. Keterbukaan: Tidak ada argumen yang dikesampingkan tanpa penjelasan yang rasional.
3. Konsensus: Keputusan akhir harus mencerminkan kepentingan bersama dan diterima secara sukarela oleh semua pihak yang terlibat.

Pendekatan ini sangat relevan dalam konflik global di mana sering kali keputusan dibuat oleh kelompok yang dominan tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak yang lebih lemah. Dalam forum internasional seperti PBB, penerapan etika diskursif dapat membantu menciptakan mekanisme dialog yang lebih representatif, di mana suara dari negara-negara berkembang memiliki bobot yang setara dengan negara-negara maju (Habermas, 1990).

1.3. Ruang Publik: Arena untuk Dialog

Habermas juga memperkenalkan konsep ruang publik, yaitu arena sosial di mana individu dapat berdiskusi tentang isu-isu bersama tanpa pengaruh dari kekuasaan politik atau ekonomi. Ruang publik ini menjadi esensial untuk membangun dialog yang inklusif dan demokratis. Dalam masyarakat modern, ruang publik mencakup berbagai bentuk, mulai dari media tradisional seperti surat kabar hingga platform digital seperti media sosial. Namun, ruang publik juga menghadapi tantangan, terutama di era digital. Sementara media sosial memperluas akses ke ruang publik, ia juga dapat memperburuk disinformasi dan polarisasi. Habermas menekankan pentingnya menjaga integritas ruang publik sebagai tempat untuk dialog yang rasional dan konstruktif (Eide, Kunelius, & Phillips, 2021).

1.4. Penerapan dalam Hubungan Internasional

Teori tindakan komunikatif dan etika diskursif Habermas dapat memberikan pendekatan baru untuk mengelola konflik antar-peradaban. Sebagai contoh, dalam hubungan Barat dan Dunia Islam, pendekatan ini dapat digunakan untuk menciptakan ruang dialog yang menghormati perbedaan budaya dan agama. Rasionalitas komunikatif memungkinkan negara-negara dengan latar belakang peradaban yang berbeda untuk mengeksplorasi kepentingan bersama dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam konteks perubahan iklim, teori Habermas relevan untuk menjelaskan pentingnya keterlibatan semua negara dalam diskusi global. Forum seperti *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dapat menjadi ruang deliberatif di mana negara-negara maju dan berkembang bekerja sama untuk mengatasi krisis iklim dengan cara yang adil dan setara (Falkner, 2021: 623-640).

B. Analisis Studi Kasus: Konflik Global dan Dialog Antar-Peradaban

Teori tindakan komunikatif dan etika diskursif Jürgen Habermas memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami dan menangani konflik antar-peradaban. Pendekatan ini memungkinkan kajian terhadap dinamika dialog dan hambatan struktural yang menghalangi tercapainya konsensus yang sah. Bagian ini mengelaborasi penerapan teori Habermas dalam studi kasus konflik global dengan fokus pada konflik Israel-Palestina, perdebatan perubahan iklim, dan dialog lintas budaya di bawah inisiatif *Alliance of Civilizations*. Analisis ini menggunakan sumber-sumber terkini untuk memperkaya pemahaman dan memperkuat relevansi teori Habermas.

1. Konflik Israel-Palestina: Dialog yang Terhambat Ketimpangan Kekuasaan

Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik antar-peradaban yang paling kompleks dan berkepanjangan. Konflik ini tidak hanya melibatkan dimensi politik dan ekonomi tetapi juga perbedaan budaya dan agama yang mendalam. Dengan menggunakan prinsip rasionalitas komunikatif, analisis ini menyoroiti hambatan-hambatan utama dalam menciptakan dialog yang sejati antara kedua belah pihak.

Ketimpangan kekuasaan antara Israel dan Palestina adalah salah satu hambatan utama dalam dialog. Israel, sebagai negara yang lebih dominan secara militer dan diplomatik, memiliki akses yang lebih besar ke narasi global melalui aliansi dengan negara-negara besar. Sebaliknya, Palestina sering kali diposisikan sebagai aktor yang kurang memiliki legitimasi internasional. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip Habermas bahwa dialog harus bebas dari dominasi agar dapat menghasilkan konsensus yang sah (Habermas, 1984). Rasionalitas komunikatif Habermas menuntut bahwa setiap partisipan dalam dialog memiliki hak yang setara untuk menyampaikan pandangan mereka. Dalam konteks ini, diperlukan mekanisme yang memastikan partisipasi setara bagi Palestina dalam forum internasional. Upaya seperti mediasi yang dilakukan oleh *United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process* (UNSCO) dapat dilihat sebagai langkah menuju dialog yang lebih inklusif, meskipun efektivitasnya masih diperdebatkan (UNSCO, 2023).

Etika diskursif Habermas menekankan bahwa keputusan yang dihasilkan melalui dialog harus mencerminkan kepentingan bersama dari semua pihak yang terlibat. Dalam konteks Israel-Palestina, pendekatan ini relevan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Misalnya, upaya untuk membangun dua negara (*two-state solution*) dapat diorientasikan pada prinsip inklusivitas, di mana semua pihak—termasuk komunitas minoritas—dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Studi terbaru oleh Barak dan Blecher, menunjukkan bahwa upaya mediasi yang memperhatikan perspektif lokal lebih efektif dalam membangun kepercayaan antara kedua belah pihak (Barak & Blecher, 2022).

2. Perdebatan Perubahan Iklim: Ruang Deliberasi Global

Konflik perubahan iklim adalah contoh lain di mana teori Habermas dapat diterapkan. Dalam konteks ini, dialog antar-peradaban muncul melalui negosiasi global antara negara maju dan berkembang. Forum seperti *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) berfungsi sebagai ruang deliberatif global di mana negara-negara bernegosiasi untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Negosiasi perubahan iklim sering kali mencerminkan ketimpangan antara negara maju dan berkembang. Negara-negara maju cenderung mendominasi narasi dengan menekankan solusi berbasis teknologi tinggi, sementara negara berkembang fokus pada kebutuhan adaptasi dan keadilan distribusi. Situasi ini mencerminkan hambatan yang bertentangan dengan prinsip rasionalitas komunikatif Habermas, di mana dialog harus dilakukan dalam kondisi setara (Falkner, 2021: 623-640). Untuk menciptakan deliberasi yang lebih inklusif, pendekatan Habermasian dapat digunakan untuk merancang proses negosiasi yang memberikan ruang lebih besar bagi suara dari negara-negara berkembang. Studi terbaru oleh Rajamani dan Peel, menunjukkan bahwa penguatan mekanisme partisipasi dalam UNFCCC dapat meningkatkan legitimasi keputusan global (Rajamani & Peel, 2023). Habermas juga menekankan pentingnya solidaritas global sebagai dasar untuk mengatasi tantangan bersama seperti perubahan iklim. Dalam konteks ini, solidaritas dapat diwujudkan melalui mekanisme keuangan seperti *Green Climate Fund*, yang bertujuan membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Namun, efektivitas inisiatif ini bergantung pada penerapan prinsip inklusivitas dan partisipasi yang sejati.

3. Dialog Lintas Budaya di Bawah Inisiatif Alliance of Civilizations

Inisiatif *Alliance of Civilizations* (AoC) yang diluncurkan oleh PBB adalah contoh upaya institusional untuk mempromosikan dialog lintas budaya. AoC bertujuan mengatasi ekstremisme dan mempromosikan perdamaian melalui pendidikan, media, dan kerja sama lintas budaya. Pendekatan Habermas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas AoC dalam menciptakan dialog lintas budaya yang inklusif dan bebas dari dominasi. Habermas menekankan pentingnya ruang publik sebagai arena untuk dialog yang sejati. Dalam konteks AoC, media digunakan sebagai alat untuk menyebarkan pesan solidaritas dan mengatasi stereotip budaya. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa media tidak memperkuat bias budaya yang sudah ada. Studi oleh Eide, Kunelius, dan Phillips, menunjukkan bahwa media global sering kali menggambarkan budaya non-Barat dengan cara yang bias, yang dapat merusak kepercayaan antar-peradaban (Eide, Kunelius, & Phillips, 2021).

Pendidikan adalah salah satu pilar utama dari AoC. Dalam konteks ini, prinsip etika diskursif Habermas dapat diterapkan untuk merancang kurikulum yang menghormati pluralitas budaya sambil mendorong dialog yang konstruktif. Studi terbaru oleh Al-Krenawi dan Graham, menyoroti pentingnya pendidikan berbasis budaya lokal untuk meningkatkan kapasitas dialog lintas budaya (Al-Krenawi & Graham, 2023). Penerapan teori Habermas dalam studi kasus konflik global menunjukkan potensi besar untuk menciptakan dialog yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konflik Israel-Palestina, perdebatan perubahan iklim, dan dialog lintas budaya, prinsip rasionalitas komunikatif dan etika diskursif dapat digunakan untuk mengatasi ketimpangan kekuasaan dan bias budaya. Namun,

penerapan teori ini memerlukan adaptasi kontekstual untuk mengatasi tantangan struktural yang spesifik.

C. Rasionalitas Komunikatif dan Etika Diskursif untuk Penguatan Dialog Antar-Peradaban

Dalam upaya memahami bagaimana teori Jürgen Habermas dapat digunakan untuk mengatasi tantangan dialog antar-peradaban, penggabungan konsep rasionalitas komunikatif dan etika diskursif menjadi kunci utama. Kedua konsep ini tidak hanya menawarkan pendekatan filosofis yang mendalam tetapi juga menyediakan kerangka kerja praktis untuk merancang dialog yang inklusif dan solutif dalam konteks hubungan internasional yang kompleks. Bagian ini berfokus pada (1) penjabaran penggabungan kedua konsep, (2) penerapannya dalam studi kasus nyata, serta (3) pengembangan kerangka konseptual baru berdasarkan kritik dan kebaruan literatur.

1. Mengintegrasikan Rasionalitas Komunikatif dan Etika Diskursif

Rasionalitas komunikatif Habermas menekankan pentingnya tindakan komunikasi yang didasarkan pada saling pengertian dan kejujuran antara aktor. Hal ini menjadi landasan penting untuk dialog antar-peradaban, mengingat sering kali terjadi ketegangan akibat prasangka budaya, ketimpangan kekuasaan, dan pengalaman kolonial. Dalam hal ini, etika diskursif memperkuat konsep ini dengan menekankan prinsip inklusivitas, di mana semua pihak memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam proses deliberasi. Penggabungan kedua konsep ini menghasilkan pendekatan yang unik untuk memahami perdamaian global. Sebagai contoh, dalam konteks ketegangan antara dunia Barat dan Dunia Islam, penerapan rasionalitas komunikatif dapat membantu memediasi perbedaan pandangan tentang isu-isu sensitif seperti kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan demokrasi. Etika diskursif, di sisi lain, memastikan bahwa proses dialog berjalan secara adil tanpa adanya dominasi satu budaya terhadap yang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Benhabib, deliberasi demokratis berdasarkan prinsip Habermasian mampu menciptakan "ruang publik transnasional," di mana aktor-aktor lintas budaya dapat membangun konsensus yang legitim melalui dialog rasional. Ini relevan dengan upaya institusi internasional seperti UNESCO dalam mempromosikan pendidikan lintas budaya dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya (Benhabib, 2004:173-177)

Salah satu contoh konkret adalah upaya dialog yang dilakukan melalui United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC). Organisasi ini menggunakan pendekatan deliberatif untuk menjembatani pandangan dunia Barat yang sering menekankan individualisme dengan Dunia Islam yang lebih kolektivistis (UNAOC, 2023). Dalam pendekatan ini, rasionalitas komunikatif berperan dalam menciptakan ruang dialog, sedangkan etika diskursif memastikan semua pandangan dihormati. Laporan UNAOC tahun 2023 menyoroti keberhasilan program "Education for Peace," yang mengedepankan dialog lintas budaya untuk mencegah radikalisasi generasi muda (UNAOC, 2023). Prinsip-prinsip Habermasian tercermin dalam metode mereka, termasuk penggunaan fasilitator netral dan pendekatan berbasis bukti dalam membangun narasi bersama. Dalam konflik ini, pendekatan Habermasian dapat diimplementasikan untuk menciptakan dialog yang lebih substansial antara kedua belah pihak. Barak dan Blecher menekankan bahwa narasi lokal dari kedua komunitas harus menjadi titik awal untuk membangun saling pengertian (Barak & Blecher, 2022). Pendekatan ini melibatkan rasionalitas komunikatif untuk mengidentifikasi kesamaan nilai dasar dan etika diskursif untuk memastikan dialog berlangsung tanpa penghakiman.

2. Mengembangkan Kerangka Baru untuk Dialog Antar-Peradaban

Menggabungkan rasionalitas komunikatif dan etika diskursif bukanlah tanpa tantangan. Kritik terhadap teori Habermas sering kali muncul karena anggapan bahwa pendekatan ini terlalu idealis

dalam konteks ketimpangan kekuasaan global. Namun, kritik ini dapat diatasi dengan memperbarui kerangka teoritis Habermasian melalui sinergi dengan pendekatan intersektoral. Sebagai contoh, Eide et al. dalam *Journalism and the Globalization of the Public Sphere* menunjukkan bahwa media massa memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik global (Eide, Kunelius, & Phillips, 2021). Integrasi media dalam kerangka Habermasian dapat memperluas ruang deliberasi dengan menjangkau audiens yang lebih luas, sehingga dialog antar-peradaban tidak hanya terbatas pada elit politik atau akademisi. Selain itu, upaya untuk memperkuat kerangka ini dapat dilakukan melalui pendekatan "deliberasi multilateral," yang memadukan prinsip-prinsip Habermasian dengan teori keadilan global yang dikembangkan oleh Amartya Sen (Sen, 2009). Dengan pendekatan ini, dialog antar-peradaban dapat diarahkan untuk tidak hanya mencapai konsensus, tetapi juga menciptakan solusi yang berkelanjutan dan adil. Bagian ini menunjukkan bahwa sinergi antara rasionalitas komunikatif dan etika diskursif memberikan kerangka filosofis yang kuat untuk dialog antar-peradaban. Dengan menerapkan pendekatan ini pada studi kasus nyata, seperti dialog Barat-Dunia Islam dan konflik Palestina-Israel, dapat terlihat bahwa teori Habermas memiliki relevansi praktis dalam menciptakan perdamaian global. Namun, untuk mengatasi tantangan kontemporer, pengembangan kerangka ini perlu dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan multilateral dan peran media dalam ruang publik global.

Pendekatan teori Habermas dalam dialog antar-peradaban tidak hanya relevan secara konseptual tetapi juga memberikan wawasan praktis ketika diterapkan dalam studi kasus konflik global. Bagian ini berupaya mengintegrasikan beberapa studi kasus besar—konflik Israel-Palestina, perubahan iklim, dan inisiatif *Alliance of Civilizations* (AoC)—ke dalam tema besar rasionalitas komunikatif, untuk menunjukkan bagaimana teori ini bekerja dalam berbagai konteks. Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan prinsip rasionalitas komunikatif dalam menciptakan ruang deliberasi yang inklusif dan bebas dari dominasi. Integrasi studi kasus ini juga membahas tantangan-tantangan struktural dan budaya yang menghalangi implementasi teori Habermas, sembari menawarkan pandangan tentang bagaimana dialog antar-peradaban dapat difasilitasi secara lebih efektif. Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik paling kompleks yang memerlukan pendekatan baru dalam diplomasi internasional. Ketimpangan kekuasaan yang signifikan antara Israel, sebagai negara yang secara militer dan diplomatik lebih kuat, dan Palestina, sebagai aktor yang sering dianggap marginal dalam narasi global, menciptakan hambatan besar dalam proses dialog.

Prinsip rasionalitas komunikatif dapat menawarkan kerangka untuk menciptakan dialog yang lebih setara. Habermas berpendapat bahwa semua aktor harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan didengar, tanpa dominasi dari pihak tertentu. Namun, dalam praktiknya, ini sulit dicapai. Studi oleh Barak dan Blecher (2022) menunjukkan bahwa narasi lokal dari komunitas Israel dan Palestina sering kali bertentangan, tetapi juga memiliki potensi untuk menemukan kesamaan nilai jika dikelola melalui mediasi berbasis deliberasi lokal (Barak & Blecher, 2022). Pendekatan etika diskursif Habermas menekankan bahwa dialog hanya dapat berhasil jika semua pihak yang terpengaruh oleh konflik diberi ruang untuk berpartisipasi secara setara. Dalam konteks Israel-Palestina, ini berarti melibatkan tidak hanya aktor politik utama tetapi juga masyarakat sipil, kelompok minoritas, dan komunitas internasional. Upaya seperti *Geneva Initiative* menunjukkan bahwa dialog berbasis masyarakat dapat mengatasi kebuntuan politik melalui pendekatan deliberatif yang lebih fleksibel (Barak & Blecher, 2022).

Forum seperti *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) mencerminkan dinamika ketimpangan global antara negara maju dan berkembang. Negara-negara maju cenderung mendominasi narasi dengan solusi teknologi tinggi yang sering kali tidak relevan untuk negara berkembang, yang justru lebih membutuhkan dukungan adaptasi dan pendanaan (Falkner, 2021:623-640). Prinsip rasionalitas komunikatif dapat digunakan untuk mengatasi ketimpangan ini

dengan menciptakan ruang deliberasi yang benar-benar inklusif. Rajamani dan Peel mencatat bahwa mekanisme partisipasi dalam UNFCCC dapat diperbaiki melalui pelibatan komunitas lokal dari negara berkembang dalam pengambilan keputusan, sehingga narasi yang dihasilkan lebih mencerminkan keadilan iklim (Rajamani & Peel, 2023).

Etika diskursif Habermas menuntut bahwa setiap keputusan yang dihasilkan harus mencerminkan kepentingan kolektif. Dalam konteks perubahan iklim, hal ini berarti melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat terdampak. Inisiatif seperti *Green Climate Fund* adalah contoh bagaimana prinsip ini dapat diterapkan, meskipun implementasinya masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan inklusivitas. *Alliance of Civilizations* (AoC) adalah inisiatif yang dirancang untuk menjembatani perbedaan antar-budaya dan peradaban melalui dialog lintas sektor, termasuk pendidikan dan media. Habermas menekankan bahwa media adalah elemen penting dalam menciptakan ruang publik yang inklusif. Namun, media juga dapat memperburuk stereotip dan bias budaya. Studi oleh Eide, Kunelius, dan Phillips menunjukkan bahwa media global sering kali menggambarkan budaya non-Barat dengan cara yang bias, yang memperburuk ketegangan antar-peradaban (Eide, Kunelius, & Phillips, 2021). AoC juga menekankan pentingnya pendidikan lintas budaya sebagai cara untuk mengurangi ketegangan dan mendorong dialog yang konstruktif. Pendekatan ini relevan dengan prinsip etika diskursif Habermas, yang menekankan bahwa pendidikan adalah medium untuk membangun kesadaran kolektif dan solidaritas global.

5. KESIMPULAN

- i. Teori rasionalitas komunikatif Habermas memberikan kerangka kerja filosofis yang relevan untuk memahami dan menyelesaikan konflik berbasis peradaban. Etika diskursif Habermas menekankan pentingnya inklusivitas dalam pengambilan keputusan, sehingga solusi yang dihasilkan mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Ruang publik sebagai arena dialog menjadi medium penting dalam menciptakan konsensus global yang adil.
- ii. Konflik Israel-Palestina menunjukkan bahwa pendekatan berbasis dialog dapat mengatasi ketimpangan kekuasaan dan membangun narasi bersama melalui mediasi berbasis komunitas.
- iii. Dalam konteks perubahan iklim, UNFCCC dan inisiatif seperti *Green Climate Fund* memberikan contoh bagaimana prinsip inklusivitas dapat diimplementasikan untuk mencapai keadilan iklim.
- iv. Inisiatif *Alliance of Civilizations* (AoC) menunjukkan potensi pendidikan lintas budaya dan media sebagai alat untuk memperkuat dialog antar-peradaban.
- v. Dominasi aktor kuat, seperti negara-negara maju, sering kali menghambat terciptanya dialog yang sejati. Narasi global cenderung bias terhadap budaya Barat, sehingga perspektif negara berkembang sering terabaikan.
- vi. Struktur kelembagaan internasional, seperti PBB, sering tidak mampu mewakili kepentingan negara-negara kecil secara setara. Disinformasi dan polarisasi di media sosial menjadi tantangan dalam menjaga integritas ruang publik global.
- vii. Rekomendasi dari paper ini adalah memperbaiki representasi budaya dalam forum internasional untuk menciptakan dialog yang lebih inklusif, meningkatkan kapasitas institusi global seperti AoC dalam memfasilitasi dialog lintas budaya, memanfaatkan media sosial sebagai ruang publik deliberatif, dengan memastikan pengelolaan disinformasi yang efektif, mendorong pendidikan berbasis budaya lokal melalui platform digital untuk meningkatkan pemahaman antar-budaya.
- viii. Teori Habermas terbukti relevan sebagai kerangka kerja filosofis dan praktis dalam menyelesaikan konflik antar-peradaban. Dengan mengintegrasikan prinsip rasionalitas komunikatif dan etika diskursif, dialog antar-peradaban dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan perdamaian global. Namun, keberhasilan implementasi teori ini memerlukan adaptasi kontekstual, penguatan institusi internasional, dan inovasi dalam penggunaan teknologi modern.

REFERENSI

- [1] Al-Krenawi, A., & Graham, J. (2023). *Cross-cultural education for peace and dialogue*. New York: Routledge.
- [2] Barak, O., & Blecher, N. (2022). *Mediating the Israeli-Palestinian conflict: The role of local narratives*. Jerusalem: Peace Research Institute.
- [3] Benhabib, S. (2004). *The rights of others: Aliens, residents, and citizens*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [4] Bohman, J., & Rehg, W. (2007). Jürgen Habermas. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Last modified July 1, 2007. <https://plato.stanford.edu/entries/habermas/>.
- [5] Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative democracy and beyond: Liberals, critics, contestations*. Oxford: Oxford University Press.
- [6] Eide, E., Kunelius, R., & Phillips, A. (Eds.). (2021). *Journalism and the globalization of the public sphere*. New York: Palgrave Macmillan.
- [7] Falkner, S. (2021). The Paris Agreement and the new logic of global climate politics. *International Affairs*, 97(3), 623–640.
- [8] Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action, Volume 1: Reason and the rationalization of society*. Boston: Beacon Press.
- [9] Habermas, J. (1990). *Moral consciousness and communicative action*. Cambridge: MIT Press.
- [10] Huntington, S. P. (1993). The clash of civilizations? *Foreign Affairs*, 72(3), 22–49.
- [11] Rajamani, L., & Peel, J. (2023). *The Paris Agreement at work: Negotiating climate justice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [12] Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- [13] United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC). (2023). *Annual report 2023*. New York: UNAOC.
- [14] United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2023). *Global trends: Forced displacement in 2023*. Geneva: UNHCR.
- [15] United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process (UNSCO). (2023). *Annual report 2023*. New York: UNSCO.